



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA INSPEKTORAT

Jalan Dahlia No.9 RT.04 Kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121

Laman : inspektorat.samarindakota.go.id

Post-el : inspektoratkotasmd@gmail.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024		
Baris 1	Nama OPD	INSPEKTORAT KOTA
	Program	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</i>
	Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none">Memastikan bahwa pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan gender.Melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan gender.
Baris 2	Data Pembuka Wawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang ditugaskan dalam sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah sebanyak 14 orang laki-laki dan 21 orang perempuan artinya lebih banyak tenaga pemeriksa perempuan dibandingkan dengan pemeriksa laki-laki.
Baris 3	Faktor Kesenjangan	<ol style="list-style-type: none">Kurangnya Kesadaran dan Komitmen pada PUGMinimnya Partisipasi Perempuan dalam Posisi Pengambil KebijakanStereotip Gender dalam PengawasanPerbedaan dalam Prioritas dan KepentinganKeterbatasan Pemahaman Terhadap Dampak GenderBudaya Organisasi yang Tidak Mendukung PUGPendidikan dan Pelatihan Pengawasan yang Tidak Sensitif Gender
	Sebab Kesenjangan Internal	Faktor kesenjangan internal dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (PUG) biasanya merujuk pada adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara tujuan, kebijakan, serta implementasi dalam rangka pengawasan kinerja di tingkat pemerintahan daerah. Kesenjangan ini bisa timbul dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, di antaranya:

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi yang Tidak Efisien: 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas. 3. Kurangnya Sistem Informasi dan Teknologi (IT): 4. Kelemahan dalam Sistem Akuntabilitas: 5. Keterbatasan Koordinasi antar Instansi: 6. Budaya Organisasi yang Kurang Mendukung Pengawasan:
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan Kebijakan kurang spesifik 2. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keahlian 4. Partisipasi Masyarakat yang Terbatas 5. Kepentingan Politik 6. Pengaruh Eksternal Lainnya.
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		Memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sensitif terhadap kebutuhan dan peran gender yang berbeda.
Baris 5	Rencana Aksi		Melaksanakan pengawasan kinerja pada 40 Perangkat Daerah.
Baris 6	Data Dasar/Baseline (Copy Data Pembuka Wawasan)		Jumlah Tenaga Pemeriksa yang ditugaskan dalam sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah sebanyak 14 orang laki-laki dan 21 orang perempuan artinya lebih banyak tenaga pemeriksa perempuan dibandingkan dengan pemeriksa laki-laki.
Baris 7	Pengkuran Hasil	Output	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Outcome	Jumlah laporan hasil pengawasan internal
		Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam akses terhadap layanan publik, sumber daya, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2. Adanya jaminan kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta

			memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umum.
--	--	--	--

Samarinda, 5 Januari 2024

Inspektur ,

MASI ANDI SUPRIANTO, SE
NIP. 196205311986031001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA INSPEKTORAT

Jalan Dahlia No.9 RT.04 Kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121

Laman : inspektorat.samarindakota.go.id

Post-el : inspektoratkotasmd@gmail.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Inspektorat Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
KODE Kegiatan	6.01.02.2.01		
ANALISIS SITUASI	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang ditugaskan dalam sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah sebanyak 14 orang laki-laki dan 21 orang perempuan artinya lebih banyak tenaga pemeriksa perempuan dibandingkan dengan pemeriksa laki-laki.		
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	Tujuan	3. Memastikan bahwa pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan gender. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan gender.	
	Aktivitas	- Melaksanakan pengawasan kinerja pada 40 Perangkat Daerah.	
		Perangkat Daerah : 40 Perangkat Daerah	

		Sumber daya (Inputs)	Anggaran : PAD Kota Samarinda
			Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Scanner, Proyektor, Pointer, Flashdisk, Hardisk Eksternal)
		Output	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 455.992.650	
	SDM	SDM 40 Perangkat Daerah	
	Peralatan dan Mesin	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Scanner, Proyektor, Pointer, Flashdisk, Hardisk Eksternal)	
Outcomes	Jumlah laporan hasil pengawasan internal		
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam akses terhadap layanan publik, sumber daya, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2. Adanya jaminan kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umum. 		

Samarinda, 5 Januari 2024

Inspektur ,

MAS ANDI SUPRIANTO, SE
 NIP. 196405311986031001